

Pengelolaan Radio Komunitas Kampus di Kota Makassar

Management of Campus Community Radio in Makassar City

Emilsyah Nur

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar
Jl. Racing Center II No. 25 Makassar Telp./Fax. : +62411-4660084

Email : emilsyah.nur@kominfo.go.id

Diterima : 23 Januari 2013 || Direview : 27 Maret 2013 || Disetujui : 12 April 2013

Abstrak -- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan radio komunitas kampus dan permasalahan yang dihadapi mulai dari : Penguatan Jaringan (frekwensi), Advokasi (legitimasi hukum dan kebijakan), Fundraising (ketersediaan sarana dan pra-sarana pendukung Penyiaran), Financial (Ketersediaan dana operasional penyiaran), dan Hubungan Internasional Antar Negara Anggota Radio Komunitas. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dari bulan Januari sampai Maret 2013 dengan mengambil sampel sebanyak 3 (tiga) informan radio kampus yang mewakili keseluruhan radio kampus yang ada di Makassar dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan penarikan sampel acak proposional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan serta kreatifitas radio komunitas kampus di kota Makassar masih mengalami hambatan dibidang regulasi kebijakan alokasi frekwensi, kebebasan dalam penyiaran tertentu, kesiapan SDM pengelola siaran radio kampus, infrastruktur pendukung sarana penyiaran, dan financial dukungan operasional radio kampus tersebut.

Kata kunci: Jaringan Frekwensi, Advokasi, Infrastruktur Penyiaran dan Financial

Abstract -- This study aims to determine the campus and community radio management problems faced ranging from: Strengthening Networks (frequency), advocacy (legal legitimacy and policy), Fundraising (availability of facilities and supporting facilities pre-Broadcasting), Financial (broadcasting operational availability of funds), International and Intergovernmental Relationsanary. The Members of Community Radio. The research was conducted in the city of Makassar from January to March 2013 by taking a sample of 3 (three) informants who represent the college radio radio in Makassar with a technique of qualitative descriptive case study. Observation methods were used in data collection and in-depth interviews with a proportional random sampling. The results showed that the management of the campus and community radio creativity in Makassar still have problems in the field of regulation of frequency allocation policy, a certain freedom in certain broadcasting, Human Resource Readiness, supporting infrastruktur and broadcasting facilities, and financial support for the campus radio operations.

Keywords: Network frequency, Advocacy, Infrastructure Broadcasting and Financial

PENDAHULUAN

Media memiliki peranan yang cukup penting dalam penyebaran informasi, khususnya yang menyangkut inisiatif lokal yang bisa menjawab tantangan pembangunan di masing-masing daerah. Peran media dalam penyebaran informasi

memberikan kontribusi besar kepada pemangku kepentingan, baik individu, kelompok, organisasi bahkan pemerintah terhadap sepak terjang mereka. Pengakuan dan penghargaan yang mereka terima, menjadi bahan berita yang inspiratif, dan membuat orang lain tergugah dan menjadikan sebagai bahan

referensi serta bahan pembelajaran sehingga informasi mengenai keberadaan media tersebut makin meluas.

Peran media dalam penyebaran informasi pada dasarnya belum menyentuh sampai ke level masyarakat lokal, karena informasi yang diperoleh baru sampai pada masyarakat yang memiliki akses baik terhadap informasi di ibukota provinsi dan pengambil keputusan di daerah. Masih ada ruang yang cukup lebar antara kedua level ini, sedangkan yang paling membutuhkan adalah masyarakat lokal dalam pemenuhan solusi-solusi pembangunan di daerah mereka. Hal tersebut juga mendorong proses pembelajaran, studi banding, dan pertukaran informasi. Pentingnya apresiasi terhadap usaha-usaha pertukaran informasi yang terjadi sampai saat ini, peran media dalam hal ini sebagai jembatan antara pemangku kepentingan satu dengan yang lainnya dalam meramu rencana pembangunan selanjutnya.

Keterkaitan pelaku pembangunan yang cukup beragam terhadap pemberitaan sebuah media menarik karena diwarnai oleh beberapa hal yang unik, kreatif, orsinil dan berkelanjutan. Isu-isu pembagunan tertentu yang menjadi tema saat ini adalah yang berbau *hot* dan *sexy*, ditambah pemberitaan yang mengangkat tema sekarang dan dibicarakan yang menjadi *headline* di berbagai media saat ini. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh *Noelle-Neumann* dalam teori spiral keheningan (*spiral of silence theory*). Kajian ini menitikberatkan peran opini dalam interaksi sosial, dimana opini publik sebagai sebuah isu kontroversial akan berkembang pesat manakala dikemukakan lewat media massa dan penyiaran.

Penyebaran media informasi perlu diadakan kerjasama lebih lanjut antara media lokal dengan semua kelompok informasi yang ada di daerah masing-masing khususnya media elektronik. Pemberitaan media lokal dalam kegiatan pembangunan, menjadi salah satu penghubung informasi dengan masyarakat lokal yang ada di daerah tersebut. Selain itu, diperlukan kerjasama peningkatan kapasitas

penggunaan media informasi melalui pelatihan-pelatihan sederhana yang mengangkat sisi cerita media lokal dengan pemahaman masyarakat melalui bahasa dan pendekatan lokal.

Para pelaku pembangunan dalam membicarakan dan membawa informasi kedalam jaringannya, akan melahirkan diskusi-diskusi formal dan in-formal dalam meningkatkan dan memanfaatkan isu tematik yang diharapkan akan tercapai sebuah kesepakatan dan rencana yang jelas untuk membuat suatu rencana pembangunan yang lebih mementingkan masalah di daerah tersebut. Peran media tetap dibutuhkan dalam mendorong replikasi dan usah-usaha yang intensif setelah sebuah media penyiaran melakukan peliputan. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana penyebaran informasi tersebut diketahui secara luas, dan membuat semua orang tahu sehingga mendorong pelaku pembagunan melakukan replikasi agar masalah-masalah pembangunan bisa segera diatasi. Pemberdayaan dan pemanfaatan serta dukungan sarana serta prasarana mesti dipersiapkan sebelumnya seperti : penguatan jaringan dengan alokasi frekwensi yang standart penyiaran radio komunitas serta fleksibel, advokasi dalam bentuk dukungan regulasi dari pemerintah yang paten bagi pengelola dan pengguna radio komunitas, juga ketersediaan sarana pendukung penyiaran, pendanaan (*budgeting*) operasional penyiaran radio komunitas beserta system penggajian krunya, dan hubungan dengan dunia internasional khususnya mengenai eksistensi dan kapabilitas keberadaan radio komunitas serta pertukaran informasi tentang radio komunitas pada masing-masing Negara anggotanya.

Pada hakekatnya sebuah radio yang merupakan salah satu dari media elektronik adalah sebuah informasi jaringan (*channel*) komunikasi yang paling efektif. Ini dinyatakan oleh *Paul Lazarsfeld* yang dikutip oleh M.O.

Palapah dan Atang Syamsuddin tentang definisi radio yang mempunyai keuntungan antara lain:

1. Radio menghasilkan partisipasi *audience*
2. Para pendengar radio seolah-olah merupakan sesuatu yang bersifat pribadi
3. Perolehan secara pribadi ini oleh karena komunikasi melalui radio adalah seolah-olah mewakili suatu komunikasi secara *face to face*

Ini diperkuat dengan adanya jalinan kerjasama dengan instansi pemerintah seperti yang dilaksanakan oleh Radio Republik Indonesia Makassar Yang bekerjasama dengan komunitas radio pada sejumlah perguruan tinggi di kota Makassar. Kepala RRI Makassar, *I Made Ardika* mengatakan, pembukaan jaringan kerjasama antara radio komunitas beberapa perguruan tinggi di kota Makassar merupakan bentuk transformasi RRI sebagai lembaga penyiaran milik masyarakat, dimana sebahagian masyarakat kita masih memandang bahwa RRI hanya menjadi corong pemerintah semata dan itu tidak sepenuhnya benar. Dengan adanya transformasi ini, akan memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, generasi muda, termasuk didalamnya komunitas radio kampus yang memiliki potensi besar dalam memberikan inovasi dan kreativitas sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan dunia penyiaran di Indonesia. Melalui kerjasama ini, mahasiswa di kampus bisa mendapatkan akses secara langsung untuk bisa menyalurkan kreativitasnya melalui dunia penyiaran. Selain itu, lembaga penyiaran ini dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat melalui siaran-siaran yang bertema pendidikan khususnya radio komunitas kampus di setiap universitas yang ada di kota Makassar.

Konvergensi antara media lama dan media baru dalam sebuah radio komunitas merupakan penyampaian informasi kepada komunitasnya, yang merupakan bentuk media yang baru. Retorika revolusi digital yang dibawah oleh media internet dinilai sebagai upaya untuk menyingkirkan media lama dengan media baru. Internet akan menganti penyiar media konvensional seperti media cetak, radio, dan lain-lain, yang berdampak pada interaksi dengan cara yang lebih kompleks.

Untuk merangsang pengembangan konvergensi pada media radio komunitas, dimana dengan penggunaan web pada radio komunitas itu bisa sampai pada seluruh pelosok bumi asal melalui jaringan internet dan dijamin konverjensi tersebut tidak sulit untuk dilaksanakan.

Penyiaran pada hakekatnya adalah salah satu keterampilan dasar manusia ketika berada pada posisi tidak mampu menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif untuk berkomunikasi. Penyiaran dalam konteks ini adalah untuk mendongkrak kapasitas dan efektifitas komunikasi massa dibidang media penyiaran. Dalam teori Media dan Masyarakat Massa (*Barran & Davis, 2000*), dikatakan bahwa asumsi untuk membentuk masyarakat terdiri dari :

1. Media massa dan penyiaran, memiliki asumsi yang berbahaya sekaligus menular bagi masyarakat. Untuk meminimalisir efek ini di Eropa pada masa 1920-an, penyiaran dikendalikan oleh pemerintah walaupun kebijakan ini justru berdampak buruk di Negara Jerman dengan digunakannya penyiaran untuk propaganda Nazi.
2. Media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir rata-rata audiesnya. Bahkan pada asumsi berikutnya dalam teori dikatakan bahwa ketika pola pikir seseorang sudah terpengaruh oleh media, maka semakin lama peparuh tersebut semakin besar.
3. Rata-rata orang yang terpengaruh oleh media, dikarenakan ia mengalami keterputusan dengan institusi sosial yang sebelumnya justru melindungi dari efek negatif media. Relevansi dengan hal tersebut, menurut *John Dewey*, seorang pemikir pendidikan, efek negative media dapat disaring melalui pendidikan.

Studi tentang penyiaran sebagai komunikasi massa, mesti dilihat dari beberapa teori yang menjelaskan hal tersebut diantaranya teori Stimulus Respon dan Difusi Inovasi.

Pada teori Stimulus-Respon, dikatakan bahwa efek media merupakan reaksi terhadap situasi tertentu, dimana seseorang dapat mengharapkan atau memperkirakan sesuatu dengan sejumlah pesan yang disampaikan melalui penyiaran. Teori ini memiliki tiga elemen yaitu : Pesan (*stimulus*), Penerima (*receiver*), dan Efek (*respon*), Sedangkan pada teori Difusi Inovasi,

dikatakan bahwa, pengaruh media juga dipandang tidak secara langsung mengenai individu, tetapi terdapat sumber non-media. Hanya saja dalam teori ini, pengaruh non media tidak merujuk pada *opinion leader*, tapi kepada siapa saja yang bisa mempengaruhi seperti tetangga atau teman. Karena itu, difusi inovasi melibatkan pengetahuan, persuasi, keputusan dan konfirmasi.

Banyaknya media informasi yang tersedia serta mudahnya masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi merupakan konsekuensi logis adanya kebebasan informasi. Kebebasan selain dapat memungkinkan munculnya dampak positif dan negative, apapun dampak yang muncul bukan berarti bahwa kemudian diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang berusaha untuk melakukan pembatasan-pembatasan terhadap informasi yang disampaikan oleh media informasi apalagi sampai melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menutup media informasi tersebut tanpa proses hukum melalui lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

Defenisi radio komunitas menurut *Girard (dalam Jankowski, 2002)* adalah radio komunitas yang didirikan untuk melayani masyarakat yang mendorong ekspresi dan partisipasi, dan berisi kultur lokal. Tujuan radio komunitas adalah untuk memberi suara, dan mereka yang tidak dapat bersuara, yaitu kelompok-kelompok yang termarginalisasi jauh dari pusat kota, yang populasinya terlalu kecil untuk menarik stasiun komersial besar radio komunitas juga bertujuan untuk memungkinkan komunitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan stasiun. Bentuk partisipasi tersebut bisa dalam level kepemilikan, program, manajemen, direksi, dan pembiayaan. Secara umum, penyiaran komunitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tujuannya untuk menyediakan berita dan informasi yang relevan dengan kebutuhan anggota komunitas, menyediakan medium untuk komunikasi anggota komunitas dan untuk menguatkan keberagaman politik.
- b. Kepemilikan dan kontrol dibagi antara warga, pemerintahan lokal, dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Isi dan produksi diorientasikan untuk kepentingan lokal.

- d. Produksi melibatkan tenaga non-profesional dan sukarelawan.
- e. Distribusi melalui udara, kabel dan jaringan elektronik.
- f. Audiens biasanya tertentu seperti dbatasi wilayah geografis.
- g. Pembiayaan secara prinsip non-komersial, walaupun secara keseluruhan meliputi juga sponsor perusahaan, iklim, dan subsidi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2013 di kota Makassar , Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan *Metode Kualitatif* dengan fokus pada studi kasus, yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu, selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh pada pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana menggunakan hasil wawancara dengan informan sebagai data primer yang didapatkan pada wawancara tersebut, hasil observasi di lokasi penelitian dan data mengenai informan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi) lapangan secara sistematis dalam *setting* sosial dan wawancara mendalam (*in-depth interviews*) untuk mendapatkan informasi secara akurat dan dianggap menguasai materi penelitian ini.

Dalam menentukan seorang informan, pertimbangannya adalah pada : keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh, jumlah informan yang dibutuhkan yang didasarkan pada tujuan penelitian dan kewenangan seorang peneliti dalam menentukan seorang informan yang layak untuk diwawancara, serta tidak terpengaruh pada jabatan seseorang. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari : Pengurus KPID Provinsi Sulawesi Selatan, Asosiasi Radio Swasta di Kota Makassar (PRSSNI), dan Asosiasi Radio Komunitas Makassar. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang dipergunakan terdiri dari : pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi dan pedoman wawancara khusus (*Informan kunci*) untuk melengkapi kajian dan pengelolaan baik secara internal maupun eksternal terhadap lembaga radio komunitas kampus di Makassar dalam

mencapai tujuan tersebut. Adapun pertanyaan kunci dari penelitian diatas adalah tentang penguatan jaringan, advokasi dari sisi regulasi hukum yang mengatur, sarana dan pra-sarana pendukung tentang keberadaan radio komunitas tersebut (*fundraising*), ketersediaan dana operasional pada radio komunitas yang aktif, dan tingkat hubungan internasional antar Negara yang menjadi anggota radio komunitas tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Idealnya sebuah radio kampus berada di garda terdepan sebagai penggerak proses demokratisasi di Indonesia, yang mestinya memiliki kekuatan dalam menyebarkan dan menginformasikan tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), Lingkungan Hidup dan Demokratisasi Media. Beberapa literatur yang ada, tidak banyak ditemukan tulisan yang mengupas perkembangan radio mahasiswa. Kebanyakan tulisan hanya mengupas seputar pers mahasiswa dan media cetak.

Bagi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) akan menjadi titik penting untuk menegaskan perannya dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lewat radio komunitas karena hingga kini keberadaannya di Indonesia masih mengalami berbagai persoalan. Dalam memperkuat JRK di daerah, ada beberapa persoalan yang sampai kini masih menjadi kendala dalam mencari solusi pemecahannya yaitu : **Pertama**, sampai kini, banyak radio komunitas tutup lantaran ketiadaan peran serta warga, keterbatasan biaya, hingga disegel oleh Balai Monitoring (Balmon) Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika karena belum berizin, dan tak memenuhi modus operasi baku yang ditentukan. **Kedua**, Peraturan dan perijinan menjadi persoalan yang membelenggu pasca lahirnya Undang-Undang penyiaran Nomor 3 Tahun 2000 dengan harapan akan munculnya era demokrasi penyiaran yang diwujudkan melalui radio komunitas. Harapan tersebut tidak dapat diwujudkan dengan mulus, karena Undang-Undang Penyiaran berikut turunannya berlarut dalam tarik ulur kepentingan oleh berbagai pihak, baik secara politik maupun ekonomi. Undang-undang yang mengambang sangat tidak menguntungkan bagi lembaga penyiaran radio komunitas, karena jalan untuk perijinan menjadi semakin berbelit dan panjang. Ini telah terjadi pada beberapa daerah di Indonesia seperti

radio komunitas yang sudah memenuhi prasyarat perijinan, dan telah melalui evaluasi dengar pendapat dengan warga setempat mulai dari aparat pemerintah desa sampai kecamatan yang pada akhirnya tidak mendapat izin siar dari instansi yang bersangkutan. **Ketiga**, radio komunitas juga belum maksimal dalam mendorong perubahan sosial, dimana radio komunitas adalah media yang menyuarakan masyarakat bawah, untuk mendorong perubahan atas keadaan sosial yang tidak adil, yang biasanya dirasakan oleh tingkatan bawah masyarakat. Lewat penyiaran maupun media isu sosial yang berkaitan dengan pemangku kepentingan lokal, radio komunitas diharapkan mampu mendorong perubahan yang memihak komunitas dan diharapkan mampu mendorong perubahan yang memihak komunitas terpinggirkan. Gagasan tersebut memang berlebihan, namun bukan mustahil JRKI sebagai lembaga baru tidak mapu berdiri sendiri dan harus didukung serta bekerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan dan pemberdayaan radio komunitas yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Untuk kota Makassar, radio komunitas terdiri lebih dari empat puluh radio di Sulawesi Selatan, dimana tiga diantara radio tersebut masuk sebagai radio kampus yang telah mengantungi izin prinsip penyiaran setelah melalui beberapa proses. Ketiga radio tersebut adalah : EBS Unhas, Profesi UNM dan Simponi Makassar. Menurut Ketua KPID Provinsi Sulawesi Selatan, *Rusdin Tompo*, mengatakan, pemerintah berkewajiban melakukan tiga hal terhadap sebuah radio komunitas di Makassar yaitu : Pendekatan, Pembinaan dan Koordinasi. Selain itu, pengelola radio komunitas harus mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak menjadi media untuk kepentingan tertentu.

Dari penelusuran penulis terhadap beberapa radio komunitas kampus yang masih eksis, ada beberapa kendala radio kampus yang dialami yang bersifat teknis dan psikologis yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah tidak menyediakan frekwensi khusus untuk siaran radio kampus, karena telah dikapling-kapling oleh radio swasta.
2. Banyak radio kampus yang sulit berkembang, karena pengelolannya sibuk dengan urusan dan kegiatan perkuliahan.
3. Sumber daya manusia yang terbatas dan hanya bermodal semangat dan kadang lupa akan

pentingnya pelatihan dan teknik siaran yang memenuhi standar operasional penyiaran.

4. Teknologi yang pas-pasan dan hanya mengandalkan kreatifitas rancangan teknik dengan bantuan peralatan seadanya.
5. Pendanaan yang sedikit dalam memenuhi biaya operasional penyiaran termasuk pembayaran telepon, listrik dan pemeliharaan alat pendukung penyiaran.
6. *Positioning* radio kampus yang tidak Jelas dan tidak terprogram sehingga tidak menarik untuk didengar.
7. Adanya pihak kampus yang tidak menghendaki dan mendukung berdirinya sebuah radio kampus yang dapat mematisasikan kreatifitas dan inovasi mahasiswa dalam berkarya melalui media penyiaran di kampusnya.

Kekhawatiran lembaga PRSSNI termasuk di kota Makassar, dimana regulasi rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) ditolak oleh pemerintah. Ini disebabkan karena dikhawatirkan akan merusak nasionalisme dan menumbuhkan konflik di kalangan akar rumput. Terlepas dari itu semua, radio komunitas kampus harus membunikan yang berada di lingkungan institusi pendidikan, dan tidak terlepas dari konsep akademik, ilmiah, kritis, dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberi semangat Otonomi Daerah, termasuk pemberian ranah publik radio komunitas khususnya alokasi frekwensi pada tingkat Nasional dan Daerah. Teknologi informasi dan komunikasi yang begitu modern dan canggih, akan menciptakan peluang bisnis baru di bidang media elektroik khususnya radio komunitas dengan ketersediaan alokasi frekwensi yang memadai. Menurut *Aswin Sasongko (Deputi Teknologi Informasi dan Komunikasi) dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jakarta*, mengatakan bahwa pemakaian lebar frekwensi di Indonesia harus ditata ulang untuk mengoptimalkan alokasi frekwensi yang tersedia. Oleh karena itu, Pemerintah dan pelaku usaha seharusnya dapat memikirkan bahwa frekwensi adalah sesuatu yang tetap, dan tidak bisa dipakai secara sembarangan.

Dalam pemaparan program kerja Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) periode 2008 - 2012 ada beberapa indikator yang perlu

diperhatikan oleh para pengelola radio komunitas termasuk di kampus yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan Jaringan, adalah program internal dalam wadah JRKI yang memuat beberapa program kerja seperti pembuatan database radio komunitas dan media internal.
2. Advokasi, adalah program yang bertujuan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dengan radio komunitas dalam memperjuangkan perubahan sosial kearah yang lebih baik.
3. Hubungan Internasional, adalah program yang berkaitan dengan jaringan internasional yang sedang memperjuangkan isu dan kredibilitas radio komunitas di Negara anggotannya.
4. *Fundraising*, adalah program yang berkaitan dengan daya hidup organisasi termasuk infrastruktur penyiaran dan SDM yang dimiliki oleh sebuah radio komunitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, keberadaan radio komunitas yang didukung oleh regulasi pemerintah sebaiknya dipercepat dalam menjadikan radio komunitas di kampus lebih dihargai lagi. dari persoalan masalah periklanan, masih banyak radio komunitas yang lupa diri karena kepentingan radio komunitas tidak selalu pada taraf hiburan. Radio komunitas butuh yang lebih menggigit lagi, terutama pada pasokan informasi yang dapat menyadarkan komunitas akan hak dan kewajibannya. Komunitas tidak hanya cukup dengan membawa semangat, tetapi menjadi sebuah alat perubahan sosial dalam masyarakat pendengarannya.

Haluan radio komunitas sebagai alat perubahan masyarakat memang jadi beban dan tidak mudah, karena ada tuntutan bahwa perubahan sosial itu selalu yang besar dan berat sampai merombak sistem sosial yang sudah mapan. Sikap yang telah berubah dari keadaan yang keliru, memandang dan menghormati semua jenis kelamin punya kesempatan sosial yang sama dalam setiap kehidupan yang berbeda.

Untuk itu diperlukan kesetaraan jender dalam sebuah radio komunitas sebagai penegasan posisi dan peran perempuan dalam memperkuat kemandirian radio komunitas di Indonesia khususnya di kota Makassar. *Bianca Migliaretto (Wakil Presiden WIN-AMARC Asia Pasifik)* mengatakan, soal ketimpangan jender yang mendera komunitas keseluruhan dunia bahwa jender

tidak selalu terkait perempuan, dimana jender terdiri dari perempuan, laki-laki, lesbi, gay, dan gejala kejiwaan lain, yang dibentuk oleh interaksi sosial.

Pada radio komunitas yang mengedepankan peran perempuan adalah pemahaman keadilan jender pada tubuh organisasi radio komunitas tersebut. Pemahaman tersebut telah diperlihatkan oleh beberapa pengelola radio komunitas Indonesia, dimana keterlibatan perempuan banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penyaringan berita, jika pemimpin redaksinya perempuan. Keterlibatan perempuan bisa menjadi panutan bagi komunitas dan penjaga semangat kelompok mengawal keputusan dengan akal sehat. Perempuan dapat mendorong kelompok lain yang ingin menerapkan pikiran-pikiran serupa.

Peran serta dalam mendorong kesetaraan perempuan pada radio komunitas dapat berupa bentuk dukungan yang diperlukan seperti dari keluarga, tokoh masyarakat, pendengar perempuan, dan pemerintah. Tapi semua itu jadi percuma jika kebijakan terhadap kepekaan keadilan jender justru tidak diterapkan di stasiun radio yang ada di Indonesia. Semua pengurus radio harus taat bahwa cita-cita perempuan mutlak diperhatikan, seperti lingkungan dan peralatan studio radio yang nyaman bagi perempuan juga patut diselenggarakan. Tidak boleh ada perlakuan yang beda terhadap siapapun baik perempuan maupun laki-laki.

Jadi pemahaman tentang keadilan jender dan bentuknya terhadap sebuah radio komunitas khususnya radio komunitas di kampus sangat sangat mutlak dan mendesak untuk dilakukan. Jika keadilan jender tercipta, maka pembangunan masyarakat secara keseluruhan tidaklah sulit.

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang kami lakukan terhadap beberapa radio komunitas kampus yang masih eksis di kampusnya masing-masing, pada dasarnya beberapa radio kampus tersebut memiliki beberapa kelebihan dari radio sejenisnya seperti : SDM pengelola dan penyiaran masih tetap eksis, izin siaran yang sering diperbaharui kepada instansi terkait, infrastruktur sarana penyiaran yang mendukung, dan financial operasional penyiaran yang selalu ada, sehingga radio tersebut tetap eksis hingga saat ini. Adapun yang dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan dalam skala operasi antara radio swasta dengan radio komunitas termasuk

perbedaan alokasi frekwensi khususnya pada radio komunitas yang berada di kampus.

2. Dalam media penyiaran radio komunitas kampus, baik pengirim (*sender*) maupun penerima (*receiver*) memiliki kesamaan kepentingan (*common interest*), karena keduanya merupakan anggota yang sama dari suatu komunitas yang juga memiliki kesamaan latar belakang.
3. *Image* media massa terhadap radio komunitas sebagai pilar demokrasi menjadi semakin dipertanyakan, karena dalam demokrasi terkandung prinsip *participatory democracy*, sesuatu yang sulit ditemukan dalam media massa dan media penyiaran saat ini.

Adapun saran (rekomendasi) yang dapat kami sampaikan yaitu:

1. Dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran radio komunitas adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara (*freedom of speech*) yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi dari siapapun termasuk pemerintah.
2. Demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman (*diversity*) politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran dan ide serta posisi dari kelompok minoritas.
3. Adanya alasan ekonomi mengapa regulasi media penyiaran termasuk radio komunitas diperlukan, karena tanpa regulasi akan terjadi konsentrasi dan monopoli media. Sehingga sinkronisasi regulasi penyusunan media penyiaran termasuk radio komunitas, tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya mengenai pasar bebas dan AFTA.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifuddin, 2009. *Pentingnya Regulasi Penyiaran Radio Komunitas dan Televisi Kabel di Daerah Makassar*, BBPPKI Makassar, Majalah Publik semi Ilmiah Populer
- Asikin Preditya, 2006. *Komunikasi di Era Globalisasi*, Jakarta, Gramedia
- Dirgantara On-Line, 2002. Volume 12 nomor 3 – 4, Jakarta

- Hadi Achmad, 2004. *Cyber Dalam Peningkatan Komunikasi dan Informasi*, Bandung, Yrama Widya
- M.O. Palapah dan Atang Syamsuddin. 1983, *Studi Ilmu Komunikasi*, Bandung, UNPAD
- Mufid Muhammad, 2005. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, Edisi Pertama*, Jakarta, Kencana
- Sabar, W, Ferbriandy, S, Ibnu,I.M. 2012, *Peran Media Dalam Mendorong Replikasi Praktek Cerdas, Bakti Makassar, Warga Bicara Media : Sepuluh Cerita*, Jakarta, Centre For Innovation Policy And Governance (CIPG) dan HIVOS
- Sobur Alex, 2006. *Analisis Teks Media*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Tompo Rusdin, 2012. *KPID Sulawesi-Selatan Gencar Penataan Lembaga Penyiaran Illegal*, Makassar, KPID Sul-Sel
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Wayne Persons, 2005. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan Cetakan Pertama*, Jakarta, Kencana
- Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), 2002. Id [Wikipedia.org/wiki/radio komunitas](http://Wikipedia.org/wiki/radio_komunitas)